

**MEKANISME DAN TAHAPAN
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2018**

HUKUM ACARA

(PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA)

- 1. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA;**
- 2. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON;**
- 3. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA;**
- 4. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN, JAWABAN TERMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

PH PILKADA TAHUN 2018

- **PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2018 DILAKUKAN DI PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA YANG LEBIH BANYAK DARI TAHUN 2017;**
 - **DAERAH PENYELENGGARA PILKADA MERUPAKAN DAERAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK BESAR SEHINGGA POTENSI PELANGGARAN LEBIH LUAS;**
 - **UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN LEBIH EFEKTIF EFISIEN DAN AKUNTABEL BAIK KEPADA STAKE HOLDER MAUPUN SHARE HOLDER TERUTAMA KEPADA MAJELIS HAKIM;**
 - **PILKADA TAHUN 2018 BERDEKATAN DENGAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019.**
- 

DAERAH YANG AKAN MELAKSANAKAN PILKADA TAHUN 2018

Jenis Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah Daerah
Provinsi	17
Kabupaten	116
Kota	38
<u>Jumlah</u>	<u>171 Daerah</u>

KETERANGAN BAWASLU

Bagian Kelima

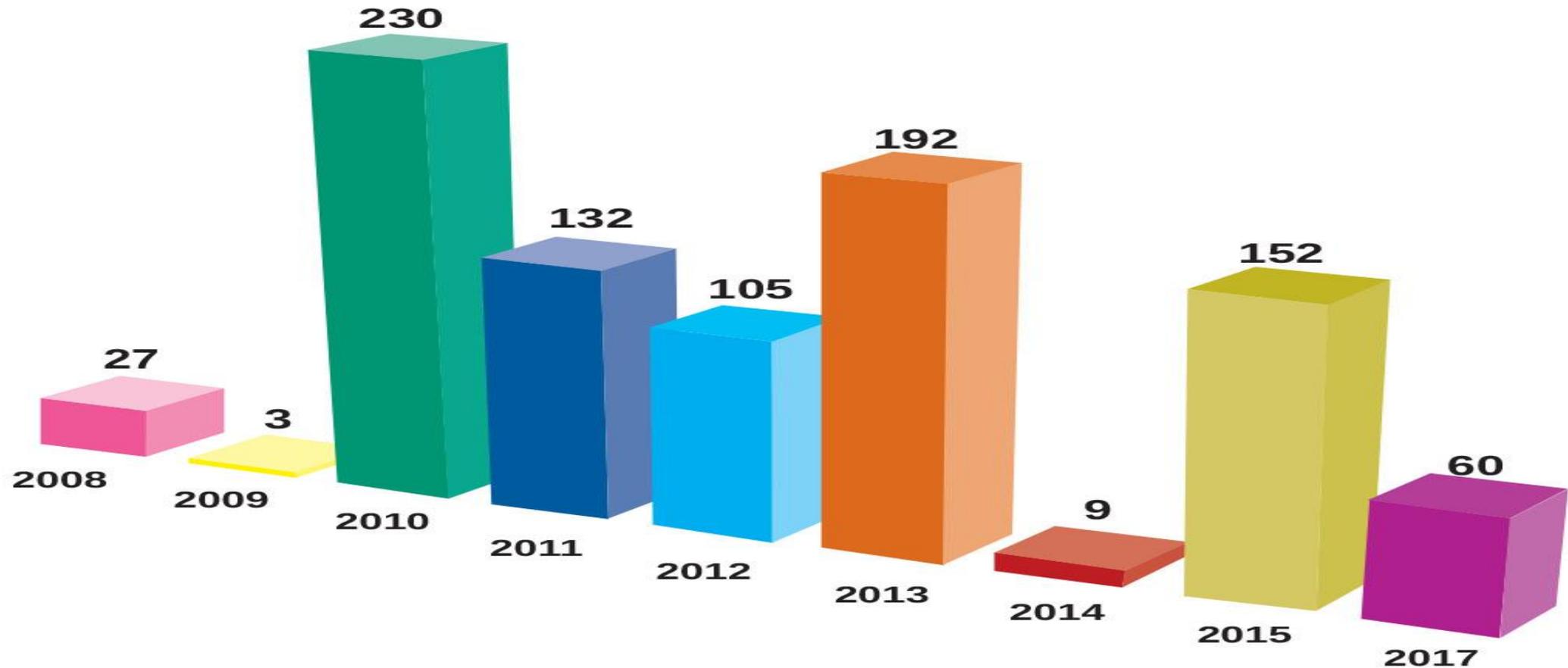
Keterangan Pihak Lain

Pasal 43

Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

PENANGANAN PERKARA PH PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

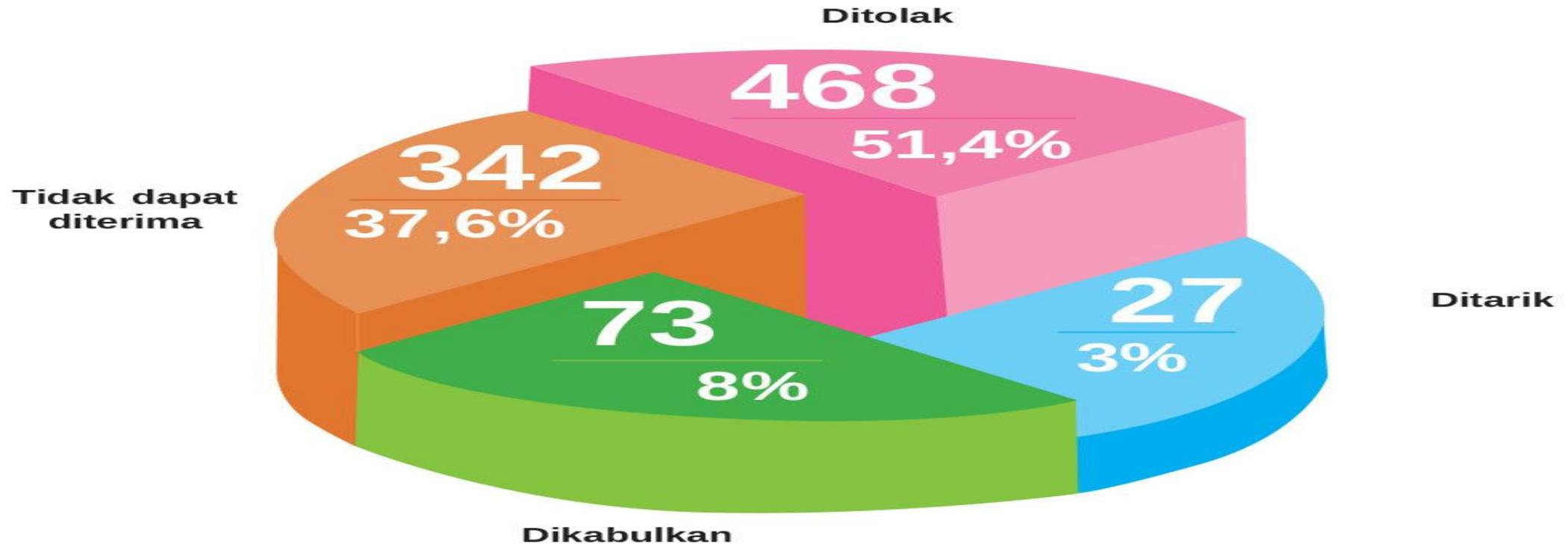
Diagram 7
Perkara Perselisihan Hasil Pilkada
2008-2017



PUTUSAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILHAN KEPALA DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

Diagram 8

Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2008-2017



PUTUSAN PH PILKADA TAHUN 2017

Diagram 9
Putusan Perkara PHP Kada 2017



KATEGORI PERMOHONAN PH PILKADA TAHUN 2017

NOMOR	KATEGORI PERMOHONAN	JUMLAH	CONTOH PERKARA	KETERANGAN
1.	PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	4	Putusan nomor 30/PHP.KOT-XV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga , Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Putusan nomor 43/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Tahun 2017, Putusan nomor 24/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Tahun 2017	
2.	PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	25	Putusan nomor 7/PHP.KOT-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Prov. Papua Barat Tahun 2017 Putusan nomor 9/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mappi, Prov. Papua Tahun 2017 Putusan Nomor 11/PHP.KOT-XV/2017 tanggal tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Batu, Prov. Jawa Timur Tahun 2017	
3.	PENGGABUNGAN ANTARA 1 DAN 2	31	Putusan nomor 3/PHP.BUP-XV/2017 2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tebo Prov. Jambi Tahun 2017 Putusan nomor 4/PHP.BUP-XV/2017 2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kab. Aceh Timur Prov. Aceh Tahun 2017 Putusan nomor 5/PHP.BUP-XV/2017 2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kab. Aceh Singkil Prov. Aceh Tahun 2017	

1. MEKANISME DAN TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
PENGAJUAN PERMOHONAN BUPATI WAKIL BUPATI	4 Juli 2018	10 Juli 2018	ON-LINE
PENGAJUAN PERMOHONAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR	7 Juli 2018	11 Juli 2018	
PENCATATAN DALAM BP2K DAN PENYERAHAN APPP 2.1 PERMOHONAN CALON BUPATI WAKIL BUPATI	4 Juli 2018	10 Juli 2018	
2.2 PERMOHONAN CALON GUBERNUR WAKIL GUBERNUR	7 Juli 2018	11 Juli 2018	

2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
			-
a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon:			
1. calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	12 Juli 2018	12 Juli 2018	-
2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	13 Juli 2018	13 Juli 2018	-
b. Penyampaian APL kepada Pemohon:			
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	16 Juli 2018	16 Juli 2018	-
2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;	17 Juli 2018	17 Juli 2018	-

3. PERBAIKAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon	a. Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	16 Juli 2018	
	2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	17 Juli 2018	
Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	16 Juli 2018	18 Juli 2018	
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur:	17 Juli 2018	19 Juli 2018	
Persiapan pencatatan dalam BRPK dan penyerahan ARPK	20 Juli 2018	a. Persiapan pencatatan dalam BRPK dan penyerahan ARPK	

4. PENCATATAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM BRPK

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;	23 Juli 2018	23 Juli 2018	
b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;	23 Juli 2018	23 Juli 2018	
2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.			

4. PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN KEPADA TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Termohon: 1. KPU/KIP kabupaten/kota; 2. KPU/KIP provinsi;	23 Juli 2018	24 Juli 2018	

5. PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN KEPADA TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
<p style="text-align: center;">Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Pihak Terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara ter-banyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon; pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ber-dasarkan hasil rekapitulasi peng-hitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. 	23 Juli 2018	24 Juli 2018	

6. PEMBERITAHUAN SIDANG PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
a. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemohon: <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota; 	23 Juli 2018	24 Juli 2018	<i>Pasal 15 ayat 3 PMK Nomor 5 Tahun 2017:</i> <i>“Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.”</i>
b. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Termohon: <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU/KIP kabupaten/kota; 2. KPU/KIP provinsi; 	23 Juli 2018	24 Juli 2018	

6. PEMBERITAHUAN SIDANG PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
<p>a. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Pihak Terkait:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.	23 Juli 2018	24 Juli 2018	

7. PEMERIKSAAN PERKARA

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
a. Telaah perkara.	23 Juli 2018	25 Juli 2018	
b. Pemeriksaan Pendahuluan.	26 Juli 2018	1 Agustus 2018	
c. Pemeriksaan Persidangan	6 Agustus 2018	10 September 2018	
d. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dalam RPH.	12 September 2018	17 September 2018	

7. Dismisal

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
a. Telaah perkara.	23 Juli 2018	25 Juli 2018	
b. Pemeriksaan Pendahuluan.	26 Juli 2018	1 Agustus 2018	
c. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dismissal dalam RPH.	6 Agustus 2018	8 Agustus 2018	
d. Putusan (dismissal)	9 Agustus 2018	15 Agustus 2018	

7. PEMERIKSA PERSIDANGAN DAN PEMBAHASAN PERKARA (LANJUTAN)

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
a. Pemeriksaan Persidangan	16 Agustus 2018	10 September 2018	Bagi Perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya
b. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dalam RPH.	12 September 2018	17 September 2018	

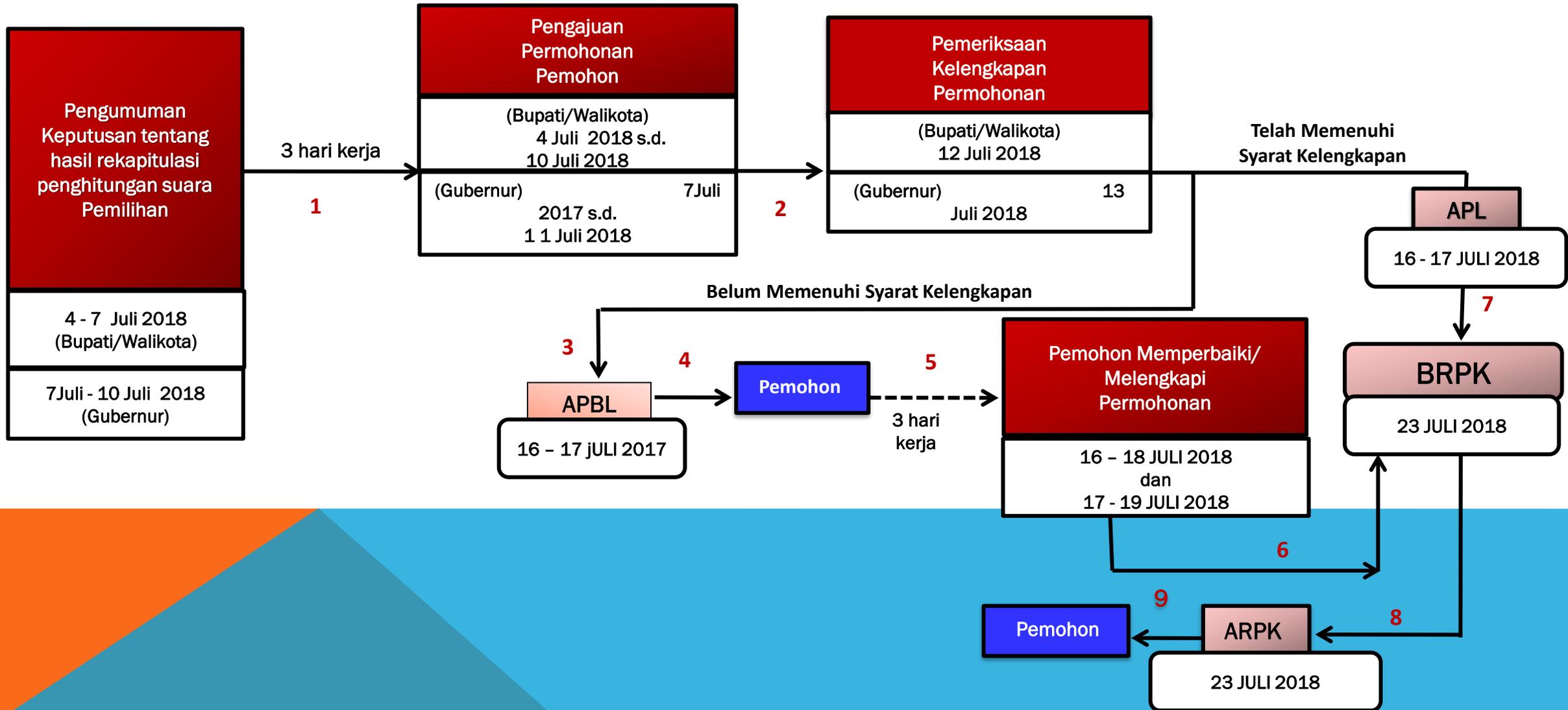
8. Pengucapan Putusan

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.	18 September 2018	26 September 2018	<p>Pasal 50 ayat 1 PMK Nomor 5 Tahun 2017: “Perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diputus Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK .”</p>
a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.	18 September 2018	26 September 2018	

9. PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN

KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	
Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.	18 September 2018	26 September 2018	Salinan Putusan dapat di unduh melalui laman Mahkamah Konstitusi 30 menit setelah Pengucapan Putusan.

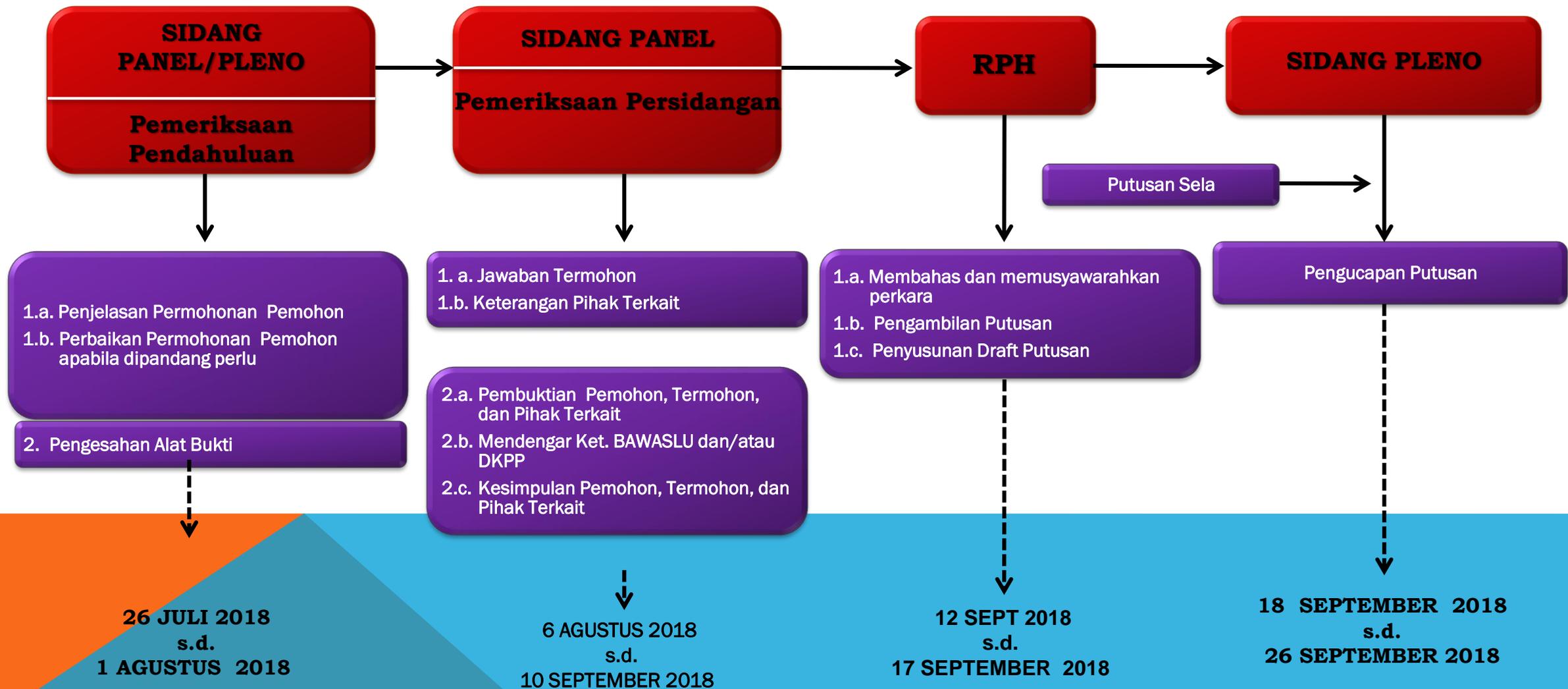
MEKANISME TAHAPAN DAN KEGIATAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



MEKANISME DAN TAHAPAN PEMBERITAHUAN PERMOHONAN, PENETAPAN HARI SIDANG PERTAMA MK DAN SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN MK

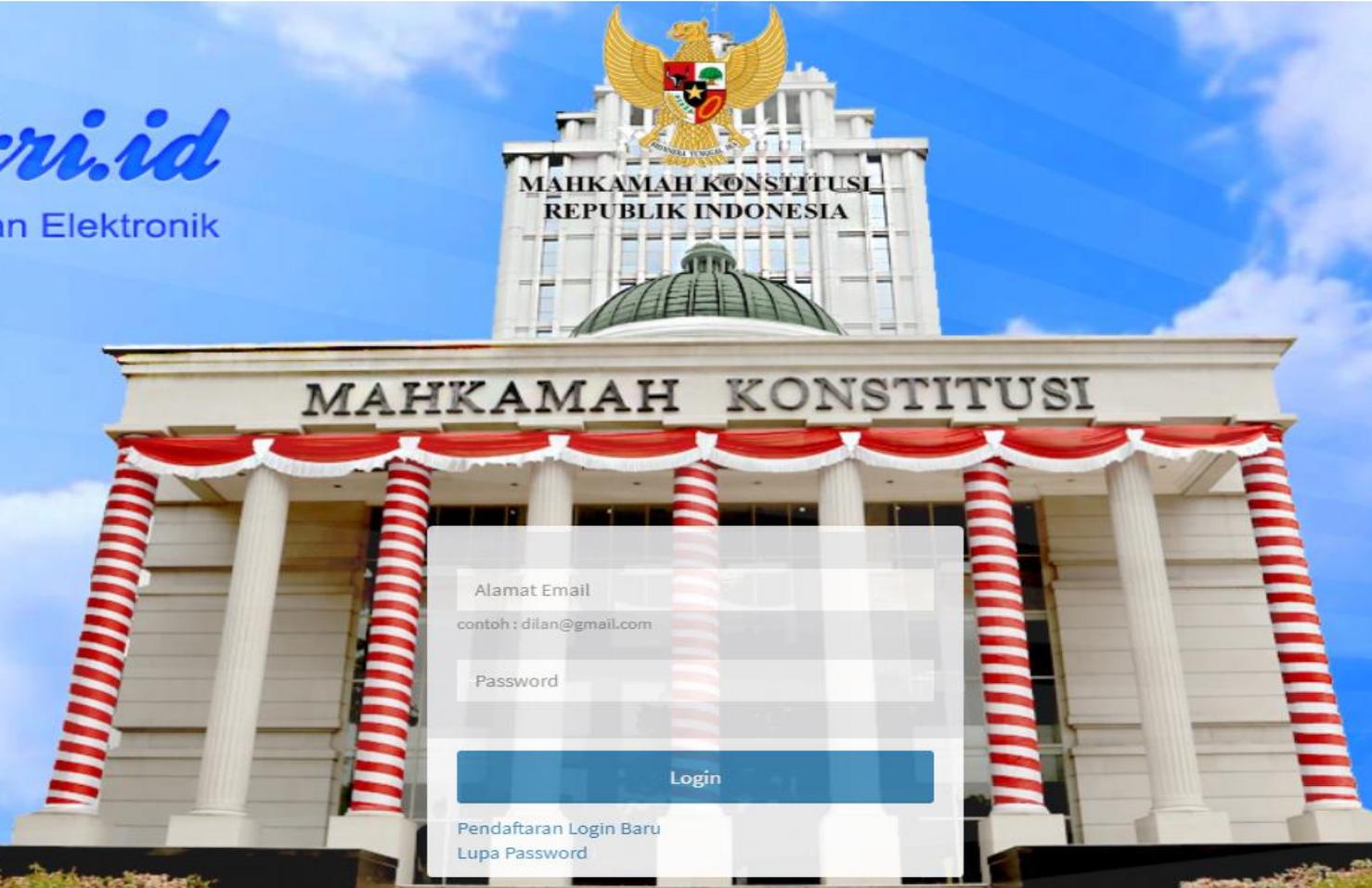


TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



← → ↻

simplpel.mkri.id
Sistem Informasi Permohonan Elektronik



Alamat Email

contoh: dilan@gmail.com

Password

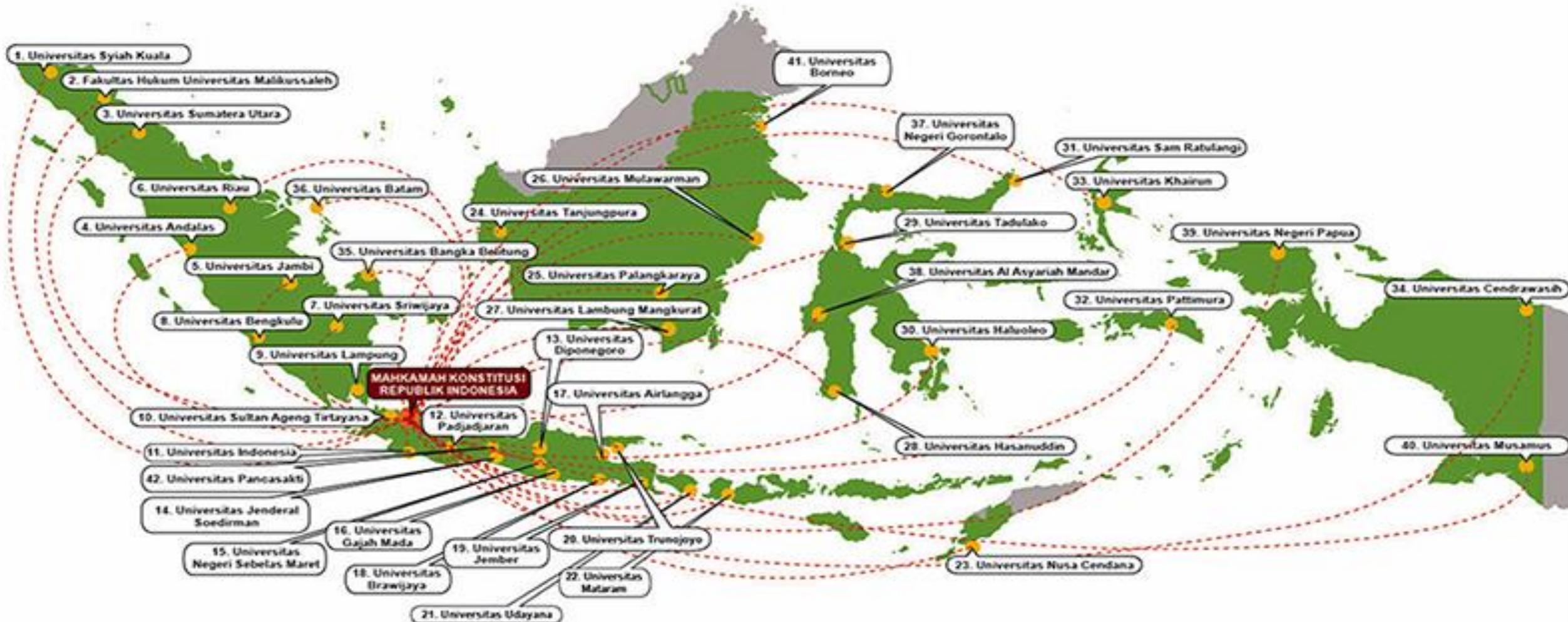
Login

[Pendaftaran Login Baru](#)
[Lupa Password](#)

PERSIDANGAN JARAK JAUH (1)

Lokasi Video Conference MKRI di Perguruan Tinggi

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



CONTOH TAMPILAN APLIKASI PENDAFTARAN OFFLINE

[Pengajuan Permohonan](#) | [Registrasi Permohonan dan Pendistribusian Berkas Perkara](#) | [Upload Akta](#) | [LogOut\(phpadmin \)](#)

Pengajuan Permohonan

Jenis Perkara	:	<input type="text" value="PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota"/>	▼
Pemilihan Kepala Daerah	:	<input type="text" value="Walikota"/>	▼
Provinsi	:	<input type="text" value="Jawa Barat"/>	▼
Kota	:	<input type="text" value="Cimahi"/>	▼
Nomor Urut Pasangan Calon	:	<input type="text"/>	▼ <input type="button" value="Pilih"/>
Tanggal NUPP	:	<input type="text" value="16"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="2017"/>	<input type="button" value="📅"/> Waktu/Jam : <input type="text" value="00"/> . <input type="text" value="00"/> WIB
Pemohon	:	<input type="text"/>	
Kuasa Pemohon	:	<input type="text"/>	
Tanggal Surat Kuasa	:	<input type="text"/>	
File	:	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.	
Yang menyerahkan,			
Nama Pemohon/Kuasa Hukum	:	<input type="text"/>	
Nomor Telepon	:	<input type="text"/>	
Alamat	:	<input type="text"/>	
Petugas,			
Nama Jelas	:	<input type="text" value="Administrasi Perkara"/>	
Tanggal Terima	:	<input type="text" value="2017-11-16"/>	
Jam/Waktu	:	<input type="text" value="11"/> . <input type="text" value="36"/> WIB	

CONTOH TAMPILAN APLIKASI PENDAFTARAN ONLINE

E-PERKARA kurniawan.rudi90@gmail.com

Berkas Permohonan Online Dashboard - Permohonan Online - PHP KADA

Permohonan Online

- Sekilas
- Jadwal
- Lokasi
- Alur
- Pendaftaran
- Permohonan
- Pendataan
- Verifikasi
- Registrasi

Pemilihan Kepala Daerah

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nomor Urut Pasangan Calon 0. Bukan Pasangan Calon

1. Identitas Pemohon

Nomor KTP

Upload KTP Browse... No file selected.
Ukuran file maksimal : 1 MB

Nama

Alamat

Email

Nomor Telepon

Nomor Faksimili

Nomor Handphone

2. Identitas Kuasa Pemohon

Nomor KTP

Upload KTP Browse... No file selected.
Ukuran file maksimal : 1 MB

Upload Surat Kuasa Browse... No file selected.
File harus dengan ekstensi (.pdf) dan ukuran file maksimal : 3 MB

Nama

Alamat

Email

Nomor Telepon Kantor

Nomor Faksimili Kantor

Nomor Handphone

Tanggal Kuasa

3. Permohonan

Upload Permohonan Browse... No file selected.
File harus dengan ekstensi (.pdf) file maksimal : 3 MB

Upload Daftar Bukti Browse... No file selected.
File harus dengan ekstensi (.doc/.docx/.xls/.xlsx) dan ukuran file maksimal : 1 MB

Upload Surat KPU Browse... No file selected.
File harus dengan ekstensi (.pdf) dan ukuran file maksimal : 5 MB

Simpan Permohonan

CONTOH TAMPILAN APLIKASI E-PERKARA YANG TERINTEGRASI

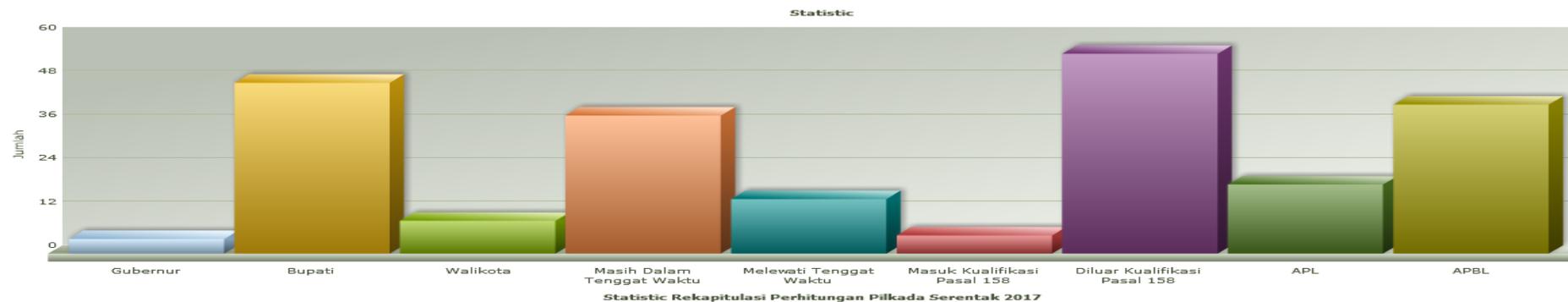
The screenshot displays the user interface of an E-Perkara application. At the top, a blue header bar contains the text "E-PERKARA" on the left and the user's email "kurniawan.rudi90@gmail.com" on the right. Below the header, a dark sidebar on the left shows the user's profile and navigation options: "Dashboard", "Permohonan Online" (with sub-items "Permohonan PHP KADA" and "Permohonan PUU"), and "Informasi Perkara". The main content area features a "Dashboard" title and the text "EPERKARA MAHKAMAH KONSTITUSI RI". Two tabs are visible: "Perkara PUU" (highlighted with a red circle) and "Perkara PHPU". Below the tabs, the heading "Perkara PUU" is displayed. A "Dashboard" link is also present in the top right corner of the main area.

CONTOH TAMPILAN APLIKASI PENGOLAHAN DATA

[Tekan disini untuk mulai mencetak](#) [Kembali](#)

ALL ALL ALL

REKAPITULASI PHPU KADA 16-11-2017 : 14:07



NO	No Permohonan	No Perkara	No Urut - Nama Pasangan Calon	Pemilihan	Daerah Jumlah Penduduk Persentase	SK KPU Waktu Pengumuman KPU	Waktu Pendaftaran di MK	Tenggat Waktu	Data Suara	Suara Sah	Keterangan
DATA KPU											
1	1/PAN/PHP-BUP/2017	36/PHP.BUP-XV/2017	1 - H. Burhanuddin B, S.E., Ak., M.Si. dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E.	Bupati	Takalar 207,356 2%	96/SK-PILKADA /KPU-025.433274/2017 22/02/2017 16:00 WITA	23/02/2017 16:27 WIB	24/02/2017	Suara Pemohon 86,090 Suara Pemenang 2 - Syamsari, S.Pt., M.M. Dan H. Achamd Dg Se're., S.Sos. 88,113	174,203	Masih Dalam Tenggat Waktu 2% dari 174,203 3,484 Selisih Suara Pemohon dan Pemenang 2,023 APBL
DATA PEMOHON											
1	1/PAN/PHP-BUP/2017	36/PHP.BUP-XV/2017	1 - H. Burhanuddin B, S.E., Ak., M.Si. dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E.	Bupati	Takalar 0 2%	Data Belum Tersedia	23/02/2017 16:27 WIB	Data Belum Tersedia	Suara Pemohon 0 Suara Pemenang 0	0	Data Belum Tersedia 2% dari 0 0 Selisih Suara Pemohon dan Pemenang 0 APBL



SEKIAN
TERIMA KASIH